

PERAN PENDAMPING DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP

Enza Resdiana, SE., M.AB

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan suatu negara, dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kemiskinan terjadi karena kualitas sumberdaya manusia yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, kerusakan lingkungan sekitar, pelayanan sosial yang kurang memadai seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas yang tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dengan demikian, pengetasan kemiskinan perlu juga mengacu pada pemenuhan kebutuhan lain selain kebutuhan materi, termasuk kebutuhan social.

PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga sangat miskin (KSM) yang dan bagi anggota keluarga KSM wajib melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. PKH bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan yang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah berbagai perilaku yang kurang mendukung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi suatu kendala yang belum bisa terselesaikan. Pada bulan Maret 2015 pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mencanangkan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk menjamin kesejahteraan sosial yang menyeluruh maka negara mengembangkan Sistem Jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta, Inpres nomor 3 Tahun 2010, tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan terhadap masyarakat.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dan focus penelitian memakai teori Ife (1995) yaitu: 1) Fasilitator, 2) Pendidik, 3) Perwakilan Masyarakat dan 4) Peranan teknis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pendamping Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dinilai cukup baik sebagai pendidik dan fasilitator bagi masyarakat miskin dalam mencapai tujuan program yaitu memutus mata rantai kemiskinan, meskipun dalam peranan yang dilakukan oleh pendamping mengalami terdapat hambatan.

Kata Kunci : Pendamping, Program Keluarga Harapan

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan suatu bentuk situasi yang terjadi bukan karena terjadi atas kehendak orang yang bersangkutan. Kemiskinan terjadi dimana seseorang sudah tidak mampu untuk memenuhi kehidupan dirinya maupun keluarganya. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan dapat dikatakan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat penting bagi perjuangan bangsa untuk dapat mengatasinya sehingga menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Dalam penggolongannya seorang atau masyarakat dikatakan sebagai miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur yaitu, dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif perkeluarga. Tingkat pendapatan diukur dengan waktu kerja selama sebulan. Jika tingkat pendapatannya tinggi maka bukan termasuk golongan miskin. Sebaliknya jika tingkat pendapatannya rendah maka dapat digolongkan miskin. Kebutuhan relatif perkeluarga berdasarkan pada kebutuhan minimal yang harus dipenuhi sebuah keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Tolak ukurnya adalah kebutuhan pokok: pangan, sandang dan papan yang cukup dan memadai.

Kemiskinan terjadi dikarenakan sulitnya pembukaan lapangan pekerjaan, hilangnya habitat dan kerusakan lingkungan sekitar, pelayanan sosial yang kurang memadai seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas yang tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dengan

demikian, pengetasan kemiskinan perlu juga mengacu pada pemenuhan kebutuhan lain selain kebutuhan materi, termasuk kebutuhan sosial dan politik

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi suatu kendala yang belum bisa terselesaikan. Di kutip dari Pusat Badan Statistik Indonesia bahwa Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Ada beberapa faktor terkait dengan jumlah peningkatan dan prosentase kenaikan penduduk miskin selama periode September 2014- maret 2015 yaitu, terjadinya inflasi sebesar 4,03 persen selama periode tersebut, tingkat inflasi di perdesaan terjadi sebesar 4,40 persen selama periode tersebut. (*BPS no.86/09/Th.XVIII, 15 september 2015*).

Kemiskinan menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan dan dituntaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kemiskinan menjadi suatu tolak ukur kesuksesan pemerintah Republik Indonesia dalam mensejahterahkan masyarakatnya. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna dalam upaya untuk mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu atau keluarga sangat miskin (KSM), pemerintah berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mencanangkan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk menjamin kesejahteraan sosial yang menyeluruh maka negara mengembangkan Sistem Jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta, Inpres nomor 3 Tahun 2010, tentang program pembangunan yang

berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan terhadap masyarakat.

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga sangat miskin (KSM) dan bagi anggota keluarga KSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan. (*Pedoman Pendamping dan Operator PKH:2015*)

PKH bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan yang di Indonesia dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan mengubah berbagai perilaku yang kurang mendukung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Khususnya PKH mempunyai tujuan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan status kesehatan untuk peserta PKH. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga sangat miskin dengan mengambil data keluarga sangat miskin dari basis data terpadu yang ada dalam Badan Pusat Statistik. Keberhasilan dari program PKH ini ditentukan dari adanya suatu pendampingan program secara insentif serta berkelanjutan. Pendampingan merupakan sesuatu hal yang penting dimana hal tersebut yang menjadi peserta PKH adalah masyarakat yang kurang mampu atau keluarga sangat miskin. Dimana peserta PKH

merupakan seseorang yang tidak mampu untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan adanya pendamping sangat memastikan peserta PKH dapat mampu untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh kegiatan PKH. Peran pendamping sangat diperlukan, dikarenakan hal tersebut untuk mencapai suatu tujuan dari PKH, dan pendampingan sangat perlu sekali diberlakukan karena PKH merupakan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, memberikan ruang tanpa batas bagi Peserta PKH untuk saling belajar dan bertanggung jawab atas komitmen yang telah disepakati dan, memperkuat modal mutu manusia bagi peserta PKH terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kabupaten Sumenep merupakan suatu kabupaten yang juga mempunyai masalah tentang kemiskinan yang masih menjadi kendala dalam proses pembangunan. Hal ini terjadi terutama karena tingkat pendidikan dan taraf hidup masyarakat masih cukup rendah. Kondisi, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang ada diharapkan mampu mendukung menciptakan generasi yang mampu membantu memutuskan mata rantai kemiskinan. Keadaan ini kemungkinan mengingat luasnya wilayah cakupan pemerintahan, terutama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka pemerataan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan masih belum dapat dicapai dengan maksimal, terutama terhadap penanganan masalah kemiskinan absolut yang menyebabkan terjadinya migrasi dan meningkatkan angka pengangguran. Salah satunya dikecamatan gapura Kabupaten Sumenep. Dengan penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan sebesar 3.411 jiwa. Dengan adanya program keluarga harapan (PKH) ini dapat membantu meringankan angka kemiskinan yang ada disumenep, utamanya di kecamatan Gapura

Kabupaten Sumenep. Didalam Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep mempunyai 438 keluarga sangat miskin (KSM) sebagai penerima PKH tahun 2015. Agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan, maka PKH yang dijalankan di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dilakukan adanya pendampingan terhadap penerima PKH.

Pendamping mempunyai peran khusus dimana pendamping diharapkan dapat mampu memandu para penerima PKH dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditentukan. Para pendamping ini tidak serta merta langsung terjun kelapangan untuk mendampingi para penerima PKH tersebut. tentunya para pendampng tersebut diberikan bekal pengetahuan bagaimana untuk mengarahkan para penerrima PKH melaksanakan kewajibannya.

Kesuksesan suatu program tergantung peran para pendamping sebagai sesuatu yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu peran pendamping sangatlah penting dalam kesuksesan program tersebut. berbagai problematika sosial dalam system perlindungan sosial mempertanyakan mengenai peran pendamping PKH dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin dalam permasalahan sosial.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul Peran Pendamping Dalam Mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Peran Pendamping Dalam Mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ? “

C. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto,1984: 237).

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang *actor* harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut : Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;

1. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
2. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
3. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambil keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan

dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab;

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003),

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Pekerja Sosial(Pendamping)

Pendamping dalam bahasa Inggris *colleague*, juga bisa ditafsirkan rekan, kolega, sahabat, sehingga maknanya sangat longgar. Realita dalam masyarakat penggunaan istilah Pendamping lebih populer dan mudah dimengerti, tetapi makna yang terkandung belum tentu dipahami oleh semua orang. Pendampingan Sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan

prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial.

Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan masyarakat disamping unsur modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia adalah unsur modal sosial seperti saling percaya sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama kolektif. Karena itu diperlukan penguatan modal sosial dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Saat ini di Indonesia telah berkembang satu sistem pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana (pelaku) dengan nama pendamping sosial untuk melengkapi pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada.

Proses sejarah lahirnya dan perkembangan dari lembaga swadaya masyarakat di bumi ini sebagian besar inisiatornya adalah Pendamping dari luar komunitas dampingan yang bertugas dan

berfungsi melakukan aksi kebudayaan dan upaya menemani rakyat atau komunitas melalui proses transformasi sosial menuju cita-cita yang diharapkan bersama.

Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan

Penguatan modal sosial dapat dilakukan melalui pendidikan agama, sosialisasi keluarga, teladan pemimpin, pemeliharaan dan institusi sosial, sosialisasi dan internalisasi pentingnya modal sosial, pengembangan komunikasi informasi, dan mengakomodasi informasi melalui proses penyaringan kemanfaatannya. Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat membutuhkan pendamping yang berfungsi sebagai seorang yang menganalisa permasalahan, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, penggerak, dan penghubung. Prinsip bekerjanya adalah kerja kelompok, keberlanjutan, keswadayaan, kesatuan khalayak sasaran, penumbuhan saling percaya, prinsip pembelajaran bersinambung, dan pertimbangan keragaman potensi khalayak sasaran

Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu : fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Dalam literatur pekerja sosial, peranan fasilitator sering disebut

sebagai pemungkin (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Barker (1987), memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping, lembaga-lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber – sumber data dan informasi, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4. Peranan Teknis

Di sini pekerja sosial melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, manajemen serta melakukan pengendalian finansial, dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peran-peran ini dapat dilakukan pekerja sosial bersama individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat melakukan mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang perhatian dari stakeholders untuk mengembangkan potensi tetapi juga membantu mempromosikan. Dengan demikian, pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antarsubyek dengan subyek yang lain (Vidhyandika 1996:135). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Menurut Tjandraningsih(1996:3), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang

diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Dalam studi dan teori tentang pembangunan dan kemiskinan, pemberdayaan merupakan istilah yang relatif baru. Di tengah pengaruh kuat teori modernisasi, kegagalan pembangunan, keterlambatan sekelompok masyarakat merespon kemajuan dan masih merebaknya persoalan kemiskinan cenderung hanya dicari dan bersumber dari kesalahan mental dan nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang miskin itu sendiri.

Gejala kemiskinan di kota erat kaitannya dengan langkanya peluang kerja yang produktif (Friedmann, 1981 : 129). Penduduk, baik pendatang desa-kota maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan kerja, dengan kemampuan yang ada menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan kehidupan kota (Effendi, 1983). Dalam banyak kasus penghasilan mereka hanya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari (Evers 1980: Sri-Edi Swasono dkk.,1986) meskipun mereka telah bekerja keras. Jadi, dapat dikatakan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh keadaan ekonomi daripada kebudayaan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan perlu dipikirkan konsep yang dapat membantu menumbuhkan kemampuan ekonomi daripada perbaikan kondisi lingkungan.

Kesejahteraan

Kesejahteraan bagi masyarakat adalah merupakan kebutuhan bagi setiap negara, karena kesejahteraan merupakan salah satu tolak ukur bagi setiap negara dalam menunjang kemajuan negara tersebut.

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern merupakan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya . Sedangkan menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Kesejahteraan (*welfare*) secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung (Suharto, 2005).

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (*mental/educational status*) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (*social status*).

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Tak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial, semua yang kita lakukan tidak dapat lepas dari orang lain. Dan setiap manusia ingin hidup dengan sejahtera. Kondisi Sejahtera yg dimaksud menunjuk pada kesejahteraan sosial, yaitu tercukupinya kebutuhan material dan non-material. Dalam masyarakat Indonesia, kondisi sejahtera itu diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi, seperti makanan yg cukup, gizi, kesehatan,

tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yg layak, dan perlindungan. Sehingga para ahli mengemukakan beberapa definisi kesejahteraan sosial.

Menurut Walter A. Friedlander, 1961 dalam Pengantar Kesejahteraan Sosial oleh Drs. Syarif Muhidin, Msc. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku *Introduction to Social Work Practice* oleh Max Siporin. “Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup.”

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2005).

D. METODOLOGI PENELITIAN

Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi, negoisasi, pemberian dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Dalam literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Barker (1987), memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi : pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan- kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan

kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi atas kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber- sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4. Peranan Teknis

Di sini pekerja sosial melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, manajemen serta melakukan pengendalian finansial, dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Peran-peran ini dapat dilakukan pekerja sosial bersama individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat melakukan mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang perhatian dari stakeholders untuk mengembangkan potensi tetapi juga membantu mempromosikan. Dengan demikian, pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti

untuk memperoleh data yang sebenarnya sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dengan alasan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan mengajukan pertanyaan terbuka (wawancara) dengan sumbernya yaitu pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, UPPKH Kabupaten Sumenep, aparatur kecamatan setempat, pihak layanan kesehatan setempat, masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung didapatkan dari subyek penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, kantor kecamatan setempat atau data yang ada relevansinya dengan penelitian.

Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dari penelitian ini maka peneliti membutuhkan alat atau instrument agar penelitian ini bisa terwujud. berikut ini adalah beberapa instrument yang digunakan :

- a. Pedoman wawancara : instrumen yang digunakan pada penelitian ini

menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka, dimana peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- b. Pedoman observasi : pedoman observasi yang digunakan pada penelitian ini dalam bentuk ceklis, untuk melihat kesesuaian antara pernyataan informan dengan kenyataan yang sebenarnya.
- c. Dokumentasi : selain pedoman wawancara dan observasi, peneliti juga melihat dokumen atau arsip, serta foto atau video kegiatan yang dilakukan.

Subjek Penelitian

Subyek penelitian kualitatif disebut dengan informan, karena dari informan inilah peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan.

Adapun informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, (1) informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong Suyanto & Sutinah, 2010:172).

Pada penelitian ini yang menjadi sampel sebagai informan adalah :

1. Informan kunci adalah Ketua UPPKH Kecamatan setempat, aparatur Kecamatan setempat
2. Informan utama adalah Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sebanyak 2 orang .
3. Informan tambahan adalah kelompok yang menerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat (Djam'an, 2009 : 104), dengan cara inilah peneliti dapat mempercayai apa yang sesungguhnya terjadi, karena peneliti melihat dengan mata kepala sendiri.

2. Wawancara

Wawancara sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi (Djam'an, 2009 : 129). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dengan cara berbaur dan mengambil bagian aktif dalam situasi sosial penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia, dokumen dapat diartikan catatan kejadian yang sudah lampau (Djam'an, 2009 : 146). Dokumen ini bisa berupa hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Sumenep, dan dokumen lain yang mendukung.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman 1984, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sedangkan aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

D. PEMBAHASAN

Peran merupakan suatu bagian yang menggambarkan interaksi sosial dimana seseorang harus berperilaku sesuai dengan yang diinginkan. Seperti halnya seorang pendamping yang merupakan suatu peran dimana seseorang yang mempunyai aktivitas menjadi mitra orang lain dan mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang ditemaninya. kaitannya dengan kehidupan sosial, dapat dijelaskan pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang berkembang dan mampu membantu serta menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat, peran pendamping sangat penting, dimana pendamping tersebut dapat membantu masyarakat yang didampinginya dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Proses pendampingan tentunya ada beberapa peran pendamping dalam melakukan pembimbingan sosial. Seperti yang diterangkan oleh Ife (1995) peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu :

1. fasilitator,
2. pendidik,

3. perwakilan masyarakat, dan
4. peranan teknis

Berdasarkan pendapat ife (1995) sebelumnya telah memberikan suatu penjelasan bahwa dalam melakukan pendampingan tentunya ada beberapa peran yang harus diperhatikan. Maka dalam hal ini, peneliti menggunakan teori dari Ife tentang peran pendamping untuk sebuah penelitian tentang Peran Pendamping dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

1. Fasilitator

Pada dasarnya pendamping merupakan seorang yang mendampingi masyarakat yang didampinginya. Peran pendamping dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat membantu memudahkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. dengan kata lain, adanya pendamping dapat memberikan suatu dukungan terhadap masyarakat akan kegiatan yang diikutinya. Pendamping merupakan seorang yang mempunyai peran sebagai fasilitator guna memberikan dorongan ataupun motivasi terhadap masyarakat. berperan sebagai fasilitator dalam pendampingan sosial, dapat membantu masyarakat yang didampinginya dalam memenuhi semua kewajibannya dalam kegiatan sosial yang diikuti.

Peran pendamping sebagai seorang fasilitator dapat dikatakan sebagai pemungkin(enabler), dimana dalam hal ini juga dengan adanya seorang pendamping dapat membantu masyarakat yang didampinginya mampu menangani tekanan situasional ataupun transisional.

Dalam melaksanakan perannya tersebut tentunya pendamping mempunyai beberapa strategi-strategi khusus, dimana hal ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan pendampingan

yang dilakukan oleh pendamping terhadap masyarakat yang didampingi.

Peran sebagai fasilitator yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep mencakup hal penting yaitu peran aktif sebagai pendamping dalam memberikan motivasi, kesempatan dan dukungan terhadap peserta PKH dalam memenuhi kewajibannya.

Peran sebagai fasilitator yang dilakukan oleh penamping terhadap peserta PKH dirasa sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH terhadap peserta PKH, pendamping selalu berperan aktif dalam mendampingi para peserta seperti saat peserta menerima bantuan PKH melalui PT. POS dan mendampingi jika terjadi suatu permasalahan dalam pencairan dana bantuan tersebut. pendamping juga mengadakan pertemuan rutin demi pemantapan para peserta dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta PKH. Pendamping PKH selalu membuat strategi-strategi saat mendampingi para peserta PKH dan selalu menyiapkan semua keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta PKH. Semua kegiatan yang dilakukan juga selalu dikoordinasikan dengan Ketua UPPKH agar terjalin suatu komunikasi yang baik.

2. Pendidik

Peran aktif seorang pendamping merupakan suatu hal penting dalam mendampingi masyarakat. sebagai seorang pendamping banyak hal yang harus dilakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pendamping merupakan seseorang yang mampu memberikan suatu arahan terhadap masyarakat yang didampinginya.

Pendamping juga dapat membagikan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengalaman dan pengetahuan masyarakat yang di dampinginya. Dengan adanya pendamping hal ini dapat membantu masyarakat dalam membangkitkan kesadaran masyarakat, penyampaian informasi dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan peran seorang pendidik.

Peran pendamping sebagai pendidik tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Peran pendamping sebagai pendidik harus mengetahui siapa dan bagaimana masyarakat yang akan didampinginya. Mulai dari memberikan suatu arahan terhadap masyarakat yang didampinginya sampai membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. seperti halnya peran pendamping dalam kegiatan PKH ini tentunya, seorang pendamping PKH harus mampu mengarahkan para peserta PKH untuk memenuhi kewajibannya.

Peran pendamping PKH Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sebagai pendidik mempunyai hal penting yang harus diperhatikan yaitu, dapat mengarahkan peserta PKH untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, pendamping PKH memberikan masukan dan bertukar pikiran dengan peserta yang didampinginya. Peran pendamping sebagai pendidik dalam Program Keluarga Harapan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dirasa sudah sesuai dengan harapan. Pendamping mengarahkan peserta PKH dengan cara menjelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban peserta, bahkan memberikan pemahaman tentang mendidik anak yang baik, membantu

anak sukses di sekolah, mengatur keuangan keluarga, dan peserta PKH juga diberi modul tentang peningkatan kualitas keluarga PKH. Pendamping selalu menjelaskan berulang-ulang kembali melalui pertemuan kelompok, juga selalu mengingatkan tentang tujuan pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Seperti yang dijelaskan oleh peserta PKH bahwa cara pendamping mengarahkan peserta agar bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan dengan mengingatkan peserta PKH di setiap pertemuan rutin kelompok bahwa peserta mempunyai suatu kewajiban untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Pendamping juga selalu memotivasi/memberikan dorongan kepada peserta PKH yang di dampinginya.

3. Perwakilan Masyarakat

Menjadi seorang pendamping juga merupakan penghubung antara masyarakat dan lembaga pemerintahan. Dimana pendamping dapat berinteraksi dengan dengan lembaga-lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat yang didampinginya sebagai perwakilan masyarakat. Terkait dengan pendamping PKH Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep mempunyai peran penting sebagai perwakilan masyarakat.

Peran pendamping PKH kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sebagai perwakilan masyarakat dirasa sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya pendamping PKH berperan cukup baik dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Seperti yang dijelaskan oleh pendamping dan Ketua UPPKH bahwa pendamping selalu melakukan koordinasi dengan lembaga/organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH. Dalam hal ini

juga peserta PKH merasa puas dan terbantu dengan apa yang telah dilakukan oleh pendamping dalam kegiatan PKH di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Dalam mempererat hubungan masyarakat dengan lembaga/organisasi pemerintahan terkadang pendamping melakukan pertemuan dengan lembaga/organisasi pemerintahan dan juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat dalam rapat sosialisasi dengan pihak desa sehingga ada keterlibatan pihak masyarakat.

5. Peranan Teknis

Pendamping merupakan mitra masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat. pendamping juga berperan dalam peranan teknis dimana pendamping merupakan seorang yang melakukan pengumpulan data dan analisis data, menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi, manajemen serta melakukan pengendalian *financial* dan *need assessment* dalam mengemangkan potensi individu ataupun kelompok masyarakat yang didampinginya.

Peran pendamping PKH kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sebagai peranan teknis dirasa kurang sesuai, dikarenakan masih terdapat suatu kendala atau permasalahan teknis yang masih ada dalam seperti sejak peserta menerima bantuan PKH seperti adanya peserta yang masih belum mempunyai KK, KTP, Akte kelahiran, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), selain itu masih ada yang kurang paham menghitung bantuan uang diterima dan pemanfaatannya secara tepat.

Meskipun begitu peran pendamping dalam peranan teknis juga melakukan suatu evaluasi dan monitoring

terhadap perkembangan dari peserta dan kegiatan PKH dengan berkoordinasi terhadap Ketua UPPKH dengan melaporkan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk laporan bulanan, dan berita acara kegiatan-kegiatan dan tugas yang diberikan, melalui operator tingkat kabupaten yang nantinya dilaporkan kepada koordinator kabupaten, kordiv maupun kantor UPPKH Pusat. Evaluasi dilakukan melalui rapat dengan Kepala Dinas Sosial, Ketua UPPKH Kabupaten dengan mengundang Operator dan pendamping PKH untuk mengetahui kendala dan memberikan solusi bersama. Selain itu terkait informasi tentang PKH, pendamping selalu menyampaikan informasi tersebut kepada peserta melalui ketua kelompok peserta PKH yang telah dibentuk sebelumnya oleh pendamping PKH Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Peran Pendamping dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dengan melalui tahap analisis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Pendamping Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep setelah dibahas sebelumnya dinilai cukup baik, meskipun dalam peranan yang dilakukan oleh pendamping mengalami sedikit hambatan. Hal tersebut bisa dinilai dari teori yang digunakan oleh peneliti menggunakan teori Ite (1995) yang dijadikan suatu focus penelitian sebagai berikut :

1. Fasilitator

Peran pendamping sebagai fasilitator memegang peranan sangat penting dalam proses pelaksanaan PKH Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Sebagai fasilitator, pendamping memberikan suatu pemotivasian,

kesempatan dan dukungan terhadap peserta PKH. Dalam hal ini juga sebagai fasilitator, pendamping merupakan seseorang yang dapat membantu peserta dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta PKH. Peran pendamping sebagai seorang fasilitator dapat dikatakan sebagai pemungkin (enabler), dimana dalam hal ini juga dengan adanya seorang pendamping dapat membantu masyarakat yang didampinginya mampu menangani tekanan situasional ataupun transisional.

Pendamping PKH Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep berperan aktif dalam mendampingi peserta PKH seperti pendampingan saat saat pencairan dana bantuan PKH di PT.POS dan membantu peserta jika terjadi suatu permasalahan. Pendamping selalu menyiapkan semua keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta PKH. Semua kegiatan yang dilakukan juga selalu dikoordinasikan dengan Ketua UPPKH agar terjalin suatu komunikasi yang baik.

2. Pendidik

Peran pendamping sebagai pendidik tentunya juga tidak kalah pentingnya. Dimana sebagai pendidik, pendamping PKH merupakan seseorang yang mampu memberikan arahan terhadap peserta PKH yang didampinginya. Pendamping juga dapat membagikan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pemalaman dan pengetahuan masyarakat yang di dampinginya.

Pendamping PKH di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dapat mengarahkan peserta PKH dengan cara menjelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban peserta, bahkan memberikan pemahaman tentang mendidik anak yang baik, membantu

anak sukses di sekolah, mengatur keuangan keluarga, dan peserta PKH juga diberi modul tentang peningkatan kualitas keluarga PKH. Pendamping selalu menjelaskan berulang-ulang kembali melalui pertemuan kelompok, juga selalu mengingatkan tentang tujuan pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pendamping selalu melaksanakan pertemuan rutin dan selalu memberikan motivasi/dorongan kepada peserta PKH yang di dampinginya.

3. Perwakilan Masyarakat

Peran pendamping PKH sebagai perwakilan masyarakat merupakan penghubung antara masyarakat dengan lembaga/organisasi terkait kegiatan PKH. Dimana pendamping dapat berinteraksi dengan dengan lembaga-lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat yang didampinginya sebagai perwakilan masyarakat.

Pendamping PKH di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep selalu melakukan koordinasi dengan lembaga/organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH. Dalam hal ini juga peserta PKH merasa puas dan terbantu dengan apa yang telah dilakukan oleh pendamping dalam kegiatan PKH di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Dalam mempererat hubungan masyarakat dengan lembaga /organisasi pemerintahan terkadang pendamping melakukan pertemuan dengan lembaga/organisasi pemerintahan dan juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat dalam rapat sosialisasi dengan pihak desa sehingga ada keterlibatan pihak masyarakat.

4. Peranan Teknis

Peran Pendamping PKH sebagai peranan teknis merupakan seseorang

yang melakukan pengumpulan data dan analisis data, menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi, manajemen serta melakukan pengendalian *financial* dan *need assessment* dalam mengembangkan potensi individu ataupun kelompok masyarakat yang didampinginya.

Dalam melakukan pendampingan sebagai peranan teknis dalam kegiatan PKH di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep masih terdapat suatu kendala/hambatan teknis yang masih belum bisa terselesaikan. Namun, meskipun begitu dengan adanya peran pendamping sebagai peranan teknis, masyarakat sangat terbantu atas peran tersebut. selain itu, terkait informasi tentang PKH pendamping selalu menginformasikan hal tersebut melalui ketua kelompok peserta PKH, kemudian oleh ketua kelompok juga disampaikan kepada peserta PKH yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Sarwono, SW. 2011. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, S. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat : model & strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Bandung : Humaniora
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Arimbi, Achmad Santosa , 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Moelang, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Sugiyono, Prof.Dr. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutinah dan Bagong S, 2010. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cetakan Kelima, Jakarta: Media Group Kencana.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Rieneka Cipta
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2013. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Kementrian Sosial RI.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2015. *Buku Pendamping dan Operator PKH*. Kementrian Sosial RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS no.86/09/Th.XVIII, 15 september 2015).
- Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Inpres nomor 3 Tahun 2010, tentang program pembangunan yang berkeadilan